

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Islam yang menjadi agama mayoritas saat ini di Indonesia tentunya memiliki historis tersendiri. Sejak zaman Hindu-Buddha masih berjaya di Indonesia, Islam mulai masuk ke celah-celah masyarakat untuk berbaur. Dengan label agama baru ini, Islam menjadi agama yang mudah dekat dengan masyarakat guna penyebarannya. Perkembangan yang begitu pesat dikarenakan Islam tidak mengenal sistem kasta serta antusiasme masyarakat menjadikan Islam lebih mudah mengakulturasi bersamama kebudayaan asli Indonesia. Popularitas akan hadirnya Islam di Indonesia tentu melibatkan banyak masyarakat yang berperan penting dalam kisah penyebarannya, salah satunya adalah masyarakat Tionghoa.

Perkembangan Islam yang disebarkan melalui masyarakat Tionghoa mempunyai latar belakang tersendiri yang dipengaruhi oleh kedatangan Belanda. Kedatangan Belanda ke Nusantara di tahun 1596 serta berdirinya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) memiliki berbagai kebijakan yang menghambat proses asimilasi etnis Tionghoa. Kepiawaian mereka dalam berdagang menjadi faktor pendukung bagi etnis Tionghoa dengan pribumi serta membuat VOC memberikan perhatian khusus kepada etnis tersebut. VOC beranggapan bahwa etnis Tionghoa mampu sebagai penghubung antara pribumi dalam bidang perekonomian terutama

perdagangan eceran/lokal, sehingga kegiatan ekonomi desa di Indonesia mampu dikuasai oleh etnis Tionghoa (Al-Qurtuby, 2003). Kejadian ini membuat VOC membentuk kebijakan khusus yakni perlindungan dan keleluasaan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan anggapan bahwa etnis Tionghoa merupakan kaki tangan VOC menurut kaum pribumi.

Bentuk implementasi dari kebijakan VOC terhadap keleluasaan etnis Tionghoa ialah diterapkan politik pecah belah dengan mengklasifikasikan kelas-kelas masyarakat atau kasta menjadi tiga golongan, yakni: golongan atas atau pertama berisikan golongan bagi bangsa Eropa, lalu golongan menengah atau kedua diperuntukkan bagi bangsa pendatang dari timur asing (Cina), dan golongan yang terakhir atau golongan dengan kelas terendah yakni diperuntukkan bagi masyarakat pribumi. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memberikan batas bagi mereka sebab pemerintah VOC tidak menginginkan etnis-etnis yang ada di wilayah koloninya berbaur dengan pribumi (Skinner, 1979).

Menurut Gungwu (1959) dalam *The History of the Nanyang Chinese* yang dikutip dari jurnal *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia* karya Dahana (2000), ia berpendapat bahwa awal etnis Tionghoa datang ke negara-negara Asia Tenggara diperkirakan sejak abad ke-11 yang bertujuan untuk perdagangan. Pada awalnya para imigran datang di beberapa kota pesisir hanya untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat selama kunjungan perdagangan mereka (Dahana, 2000). Setelah Jayakarta dikuasai oleh Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen di tahun 1619,

Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia (sekarang Jakarta) dan mengizinkan orang-orang Tionghoa menetap di Banten dan tempat-tempat lain di luar Jawa. Melihat kota Batavia yang berpeluang tinggi, Coen berambisi untuk membuat Batavia berkembang sebagai kota perdagangan. Oleh karena itu, Coen memberi izin bagi orang-orang Tionghoa untuk menetap dan bekerja di bidang perdagangan, industri dan juga pertanian. Kondisi ini membuat kedatangan imigran Tionghoa ke Batavia secara berangsur-angsur meningkat dengan data yang tercatat bahwa di tahun 1629 terdapat sekitar 2000 orang dan di tahun 1725 mencapai 10.000 orang (Purcell, 1965).

Pasca Indonesia merdeka, warisan koloni mengenai sentimen terhadap etnis Tionghoa masih berlanjut maka salah satu solusi yang dijalankan adalah dengan melakukan pembauran dengan masyarakat pribumi. Hal ini membuat pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan tentang kewarganegaraan bagi mereka berdasarkan *ius soli* dimana kewarganegaraan didapatkan karena tempat kelahirannya. Selanjutnya baru ditetapkan perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

Setelah pemerintahan Indonesia berganti menjadi era Soeharto berbekal Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) di tahun 1966, Soeharto memberantas seluruh elemen komunis yang masih bersarang di Indonesia. Cina yang memiliki ideologi komunis disangkut pautkan sehingga berdampak kepada etnis Tionghoa saat kejadian G30 S. Sebagai tindak tegas Soeharto terhadap komunisme, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No.

14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina (Greif, 1991). Instruksi ini tentu menghambat proses pembauran seperti perayaan tahun baru Cina dan pengekspresian lainnya dilarang.

Demi memudahkan segala akses dan kebutuhan, etnis Tionghoa berusaha mengasimilasikan dirinya dengan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia serta memeluk agama Islam karena alasan praktis. Keadaan ini memaksakan mereka untuk memeluk agama Islam dikarenakan tengah menjalankan usaha agar lebih mudah diterima oleh masyarakat pribumi (Suryadinata, 1988).

Meski begitu banyak juga dari mereka yang masuk Islam karena ketertarikan, sebab Islam tak mengenal sistem kasta sehingga tidak adanya perbedaan suatu ras atau golongan lainnya. Melalui beragam tantangan dan hambatan, etnis Tionghoa memeluk agama Islam menjadikan ini sebagai tindakan atau penyempurnaan terakhir dari proses pembauran (Jahja, 1991a). Oleh karena itu, demi mengenalkan Islam kepada etnis Tionghoa maka didirikanlah sebuah lembaga atau organisasi yang dikenal sebagai Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau singkatnya disebut sebagai PITI Persatuan pada tahun 1961 (Afif, 2012).

Organisasi PITI Persatuan ialah kolaborasi dari dua organisasi Tionghoa sebelumnya yaitu Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang berasal dari Medan dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) dari Bengkulu. Kehadiran dua organisasi ini dirasa masih bersifat kedaerahan sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Tionghoa Muslim di

Indonesia. Kala itu H. Ibrahim selaku ketua PP Muhammadiyah memberikan saran kepada Abdul Karim untuk mendirikan organisasi PITI. Hal ini disebabkan tidak adanya sistem khusus untuk menyebarkan agama Islam bagi masyarakat Tionghoa yang sudah memeluk agama tersebut. Tujuan lain dari dibentuknya organisasi ini ialah agar masyarakat Tionghoa mampu mempelajari dan mendalami Islam lebih lanjut melalui organisasi yang mereka miliki (Nofra & Auliahadi, 2019). Pendirian organisasi PITI Persatuan sezaman dengan kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru tidak terlepas dari terjadinya peristiwa G 30 S. Peristiwa ini berdampak pada pelarangan nama Tionghoa sehingga adanya perubahan nama organisasi yang sebelumnya adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menjadi Pembina Iman Tauhid Islam di tahun 1972. Hal ini dilakukan karena adanya peraturan pemerintah yang ketika itu sedang menggalakan kebijakan politik anti Cina (Afif, 2012).

Lahirnya organisasi tersebut tentunya tidak lepas dari peran Haji Abdul Karim Oei sebagai tokoh sentralnya. Haji Karim Oei atau Haji Abdul Karim memiliki nama asli Tionghoa Oei Tjeng Hien yang lahir di Padang Panjang tanggal 6 Juni 1905. Beliau merupakan orang beretnis Tionghoa yang masuk agama Islam di tahun 1926. Fenomena ini menjadi sesuatu yang langka di kalangan Tionghoa ketika itu sehingga beliau diangkat sebagai Konsul Muhammadiyah di wilayah Bengkulu dan Sumatra Selatan. Dengan eksistensinya, Karim Oei mampu menjadi pelopor dalam pembauran agama Islam antara kaum keturunan Tionghoa dengan masyarakat sekitar. Dalam

lingkungan keluarganya, Karim Oei juga menerapkan asimilasi yang mana putrinya Tjioe Nio menikah dengan seorang dokter asal Indonesia. Putrinya yang kedua Eng Lie atau Iriana menikah dengan Ir. Machyar Helmy Nasution, putra dari mubaligh Yunan Helmy Nasution. Para tokoh-tokoh nasional juga turut mengagumi sosok Karim Oei yang menerapkan pembaruan dalam keluarganya sendiri (Suryadinata, 2010). Selepas beliau meninggal di tahun 1988, sebagai bentuk apresiasi atas jasanya para pengikut dari H. Abdul Karim Oei mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Haji Karim Oei atau biasa disebut dengan YHKO. Yayasan merupakan badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk memenuhi tujuan seperti kesehatan, pendidikan, dan keagamaan (K.B.B.I., 1998). Tujuan lain dari didirikannya yayasan yaitu guna beramal saleh, untuk menderma sebagian harta kekayaan dan melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Yayasan Haji Karim Oei terletak di Jalan Lautze No. 87-89 Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Yayasan ini berdiri di wilayah yang disebut sebagai kawasan Pecinan dengan dominasi etnis Tionghoa sebagai penghuninya. Kondisi bangunan dari yayasan ini adalah Masjid Lautze dengan empat lantai dan dominasi warna merah cerminan warna khas Tionghoa. Masjid ini memiliki keunikan arsitektur karena masjid yang tidak memiliki kubah dan dipadukan kaligrafi Arab dan Cina. Masjid ini didirikan di tahun 1991 dan disahkan secara resmi oleh B.J Habibie selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang juga menjabat sebagai

Menteri Riset dan Teknologi di tahun 1994. Secara historis yayasan ini merupakan gagasan dari Bapak Junus Jahja. Gagasan ini diprakarsai oleh belumlahnya masyarakat memberikan sambutan yang baik kepada orang-orang Tionghoa sehingga yayasan ini dikhususkan sebagai sarana dakwah Islam yang bergerak di kalangan keturunan Cina atau Tionghoa (Wiwoho, 2016). Kemudian usul ini disetujui untuk dibentuknya sebuah yayasan tersebut dengan nama Haji Karim Oei. Alasannya karena beliau merupakan pelopor keturunan Tionghoa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Yayasan Haji Karim Oei mempunyai perhatian khusus terhadap aktifitas dakwah di kalangan keturunan Tionghoa. Meskipun begitu segala bentuk kegiatan yang dibentuk oleh yayasan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. Didukung oleh lokasi yang memang berada di lingkungan Tionghoa atau Cina, berdirinya yayasan ini berhasil menarik antusias masyarakat khususnya di Jakarta sebagai organisasi yang mampu menjadi sarana ibadah dan pendidikan bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai keislaman. Antusiasme ini menghasilkan bentuk positif dengan didirikannya cabang-cabang Yayasan Haji Karim Oei di wilayah Tangerang, Bandung dan Cirebon. Selain berfokus pada bidang kedakwaan dan sarana mualafnya, yayasan ini juga turut bergerak pada bidang sosial.

Hingga kini, Yayasan Haji Karim Oei tetap bertahan menjadi salah satu tempat persebaran agama Islam di wilayah Jakarta yang masih eksis di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Yayasan Haji Karim Oei didirikan

oleh Etnis Tionghoa dengan proses islamisasinya yang berusaha membaaur dengan masyarakat sekitar baik yang keturunan Tionghoa maupun yang bukan. Selain itu, bentuk bangunan dari Masjid Lautze yang digunakan sebagai tempat dakwah mempunyai ciri khas berbeda dari masjid lainnya sebab masjid ini sebagai wujud dari akulturasi budaya. Akulturasi yang terlihat dari masjid ini ialah adanya pengaruh budaya Tionghoa pada arsitektur masjid mulai dari bentuk atap tanpa kubah, ornamen kaligrafi berbahasa mandarin, ornamen pintu masjid, ornamen lampion serta dominasi warna merah pada bangunannya yang identik dengan warna khas Tionghoa. Kemudian pengaruh Islam yang menjadi perpaduan budayanya dilihat dari adanya mihrab, mimbar, dan ornamen kaligrafi berbahasa Arab (Amalah, 2022). Kedua hal tersebut baik dari proses persebaran dan gaya arsitektur bangunan sebagai tempat dakwahnya menjadi keunikan tersendiri bagi Yayasan Haji Karim Oei.

Pada umumnya, setiap organisasi yang berjalan tentu akan mengalami yang namanya perubahan. Ada kalanya perubahan yang dapat berasal dari faktor internal atau faktor eksternal, perubahan dalam skala yang besar ataupun kecil, serta perubahan yang bisa dikatakan cepat ataupun lambat. Sejatinya sebagai sebuah organisasi baik PITI maupun YHKO juga turut mengalami perubahan seiring perkembangannya. Perubahan yang pastinya akan berdampak ataupun berpengaruh ke dalam tubuh kedua organisasi tersebut. Perubahan ini yang bisa dikatakan sebagai suatu dinamika di dalam organisasi. Menurut ahli dinamika merupakan tindakan beralihnya suatu

organisasi dari situasi yang berlaku saat ini menuju ke arah situasi yang akan datang sesuai dengan yang diinginkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penyusunan kembali dari komponen-komponen organisasi tersebut (Marliani & Merisa, 2024). Pengertian lain mengungkapkan dinamika juga dapat diartikan sebagai pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dalam suatu bidang tertentu. Dinamika mencakup dari sistem keterkaitan yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain antara berbagai unsur, yang disebabkan oleh hubungan langsung di antara unsur-unsur tersebut (Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2020).

Selama perjalanan PITI Persatuan dan YHKO sebagai organisasi dakwah keagamaan Islam di kalangan Tionghoa, tentu pernah mengalami kondisi naik turun dalam tubuh organisasi masing-masing. Pendirian PITI Persatuan dan YHKO di tengah carut marutnya kondisi Indonesia terhadap etnis Tionghoa, peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut diatasi dengan terbitnya beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini yang nanti memengaruhi terhadap perjalanan dari kedua organisasi tersebut. Perubahan lain yang turut memengaruhi seperti perubahan anggota organisasi hingga aktifitas dan kegiatan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah utama yakni dinamika perkembangan organisasi etnis Tionghoa muslim di Jakarta tahun 1961-2004. Alasan penulis mengambil topik dinamika organisasi etnis Tionghoa muslim khususnya

daerah Jakarta, disebabkan kedatangan etnis Tionghoa yang memiliki historis tersendiri dengan peristiwa kericuhan 1998 serta proses pembaurannya dengan pribumi. Alasan lainnya penulis juga tertarik untuk membahas bagaimana perjuangan etnis Tionghoa yang membaaur bersama Islam dengan mendirikan organisasi sebagai pegangan kuatnya dalam mempelajari Islam itu sendiri. Alasan-alasan tersebut membuat PITI Persatuan hingga Yayasan Haji Karim Oei sebagai lembaga yang memiliki fungsi sentral di kalangan masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat yang berketurunan Tionghoa saja melainkan kepada masyarakat sekitar di Jakarta. Ketertarikan ini akan penulis uji secara historis dengan mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen seperti arsip yayasan, surat kabar sezaman maupun wawancara langsung kepada H. Ali Karim Oei selaku anak dari H Abdul Karim Oei yang turut menjadi pimpinan yayasan serta wawancara kepada masyarakat yang bersentuhan langsung.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian yang berjudul *Perkembangan Agama Islam di Kalangan Etnis Tionghoa Semarang Tahun 1972-1998* karya Septian Adi Chandra dari Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menekankan pada aspek perkembangan organisasi etnis Tionghoa Islam di Semarang hingga tahun 1998 saja. Hal yang membedakan dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana dinamika dari organisasi etnis Tionghoa Islam yang berada di wilayah lain yakni di Jakarta dari peristiwa yang memengaruhi pendiriannya

hingga adanya kebijakan baru dari Presiden Abdurrahman Wahid yang diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan memberikan keleluasaan bagi etnis Tionghoa sampai tahun 2004.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memiliki batasan masalah guna kegiatan penelitian dapat lebih jelas dan terarah. Pembatasan masalah yang digunakan terbagi menjadi pembatasan spasial dan pembatasan temporal. Pembatasan spasial yang digunakan oleh penulis ialah wilayah Jakarta yang menjadi lokasi pendirian dari PITI maupun YHKO. Kemudian untuk pembatasan temporal yang berhubungan dengan massa atau waktu, penulis mengambil rentang dari tahun 1961 - 2004. Tahun 1961 dipilih dikarenakan sebagai tahun pendirian dari organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI Persatuan) yang nantinya memelopori dari pendirian Yayasan Haji Karim Oei. Sementara itu, tahun 2004 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena di tahun tersebut menjadi tahun terakhir dari masa bakti Presiden Megawati Soekarno Putri. Hubungan dari masa bakti Presiden Megawati dengan peristiwa Etnis Tionghoa Islam yakni dikarenakan sebelum Megawati menjabat, di tahun 2000 kala Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur beliau mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang berisi mencabut Inpres No. 14/1967 tentang

Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Inpres ini menjadi momentum bersejarah bagi Etnis Tionghoa karena pemerintah telah melegalkan mereka dalam menjalankan ritual keagamaan, adat-istiadat, serta mengizinkan untuk kebebasan berekspresi terhadap kebudayaannya di Indonesia (Mustajab, 2015). Pasca dikeluarkannya Inpres tersebut, setahun kemudian Gus Dur usai menjabat dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Waktu yang singkat ini dari dikeluarkannya Inpres dengan masa jabatan Presiden Gus Dur, penulis memilih tahun 2004 agar peneliti dapat leluasa mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan Inpres yang dikeluarkan oleh Gus Dur tersebut masih dijalankan atau tidak selama Megawati menjabat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah setelah pencabutan Inpres tersebut dapat memengaruhi dalam perkembangan Organisasi Islam Etnis Tionghoa dibanding kebijakan di tahun-tahun sebelumnya yang cukup mengekang terhadap aktifitas yang dijalankan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana awal mula terbentuknya organisasi etnis Tionghoa Muslim di Jakarta?
2. Bagaimana dinamika perkembangan organisasi etnis Tionghoa Muslim di Jakarta pada tahun 1961 - 2004?

3. Bagaimana aktifitas dari organisasi etnis Tionghoa Muslim Jakarta dalam pembinaan mualaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika organisasi etnis Tionghoa Islam di Jakarta, melalui Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan Yayasan Haji Karim Oei. Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjabarkan bagaimana dinamika kedua organisasi tersebut sebagai organisasi dakwah di kalangan Tionghoa yang berbasis di Jakarta dari 1961-2004 dengan beberapa peristiwa di dalam yang memengaruhi perkembangannya, serta bagaimana aktifitas dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan Yayasan Haji Karim Oei dalam pembinaan mualaf beserta pandangan dari para mualaf terhadap Yayasan Haji Karim Oei sebagai organisasi keislaman yang lebih terkenal di kalangan etnis Tionghoa.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan agama Islam di Indonesia terutama terhadap etnis Tionghoa serta sebagai salah satu referensi untuk penelitian berikutnya mengenai yayasan keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun untuk kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap sumber pustaka bagi organisasi etnis Tionghoa Islam terutama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan Yayasan Haji Karim Oei, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan perannya dalam bidang kerukunan umat beragama sehingga tidak adanya diskriminasi dalam umat beragama.

D. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Satu hal lain yang penting dalam dunia keilmuan terkait cara maupun sistem dalam pekerjaan dapat diartikan sebagai metode. Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki (K.B.B.I., 2002). Pada sebuah penulisan karya ilmiah, metode penelitian memiliki peranan paling penting dikarenakan metode akan mengatur bagaimana cara mengkaji dan menganalisa terkait permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah melalui pendekatan naratif dimana peneliti berusaha untuk menjabarkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada lalu merekonstruksinya (Kuntowijoyo, 2008). Metode historis merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa masa lampau.

Metode ini bertumpu pada langkah kegiatan diantaranya yakni: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber atau heuristik, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi, (5) kemudian menyusun dan menulis hasil yang telah dikumpulkan menjadi bentuk penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2018).

1) Pemilihan Topik

Pemilihan topik ialah langkah awal dalam penelitian sejarah untuk menentukan objek atau suatu permasalahan yang akan menjadi bahasan dan diteliti lebih lanjut. Dalam pemilihan topik, baiknya dilandasi berdasarkan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual dikarenakan kedua hal tersebut memuat penelitian yang bersifat subjektif maupun objektif. Pendekatan emosional yang dilakukan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa banyaknya organisasi dan tokoh Islam yang memberikan pengaruhnya sehingga terlibat langsung dalam perjuangan fisik untuk memperjuangkan Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti yang memiliki ketertarikan kepada tokoh Oei Tjeng Hien atau Haji Abdul Karim Oei yang berasal dari etnis Tionghoa mampu memberikan banyak sumbangsih dalam pemikirannya dan mensyiarkan ajaran agama islam kepada masyarakat. Bukti nyata bahwa beliau memperjuangkan etnis Tionghoa Islam ialah dengan menjadi salah satu apresiasi dan penghargaan khusus kepada Haji Abdul Karim Oei maka didirikan yayasan guna melanjutkan

perjuangan beliau dalam berdakwah kepada masyarakat. Dalam hal ini peneliti mencoba menggunakan pendekatan emosional tersebut dengan mencari tahu bagaimana perjuangan organisasi etnis Tionghoa muslim di Jakarta dari tahun 1961-2004 dengan segala peristiwa yang memengaruhi perkembangan aktifitasnya.

Selain pendekatan emosional, peneliti juga menggunakan pendekatan intelektual untuk menghindari subjektifitas dari penulisan. Pendekatan intelektual ini berdasarkan bahwa peneliti tertarik untuk membahas bagaimana dinamika dari organisasi etnis Tionghoa Islam sebagai simbol bahwa beberapa kaum Tionghoa telah mengasimilasikan dirinya berbaur dengan agama islam. Kemudian peneliti juga tertarik untuk membahas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh yayasan keagamaan tersebut kepada etnis Tionghoa Islam di sekitar wilayahnya.

2) Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber merupakan sebuah proses mencari dan/atau mengumpulkan sumber-sumber informasi masa lalu yang dapat dijadikan sebagai data sejarah. Guna mempermudah dalam penulisan skripsi, sumber-sumber yang digunakan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer ialah informasi perihal peristiwa terkait yang bersumber dari sumber pertama baik kesaksian langsung pelaku atau

saksi sejarah, maupun informasi yang dibuat sezaman seperti dokumen-dokumen yang selaras dengan terjadinya peristiwa tersebut. Adapun sumber primer yang peneliti dapatkan ialah data dari arsi-arsip yayasan yang berada di perpustakaan Yayasan Haji Karim Oei, lalu surat kabar sezaman yakni surat kabar Sinar Harapan, Undang-Undang Pemerintah dan arsip Instruksi Presiden. Kemudian peneliti juga menggunakan sumber sekunder sebagai pelengkap dari sumber primer yang didapatkan. Sumber sekunder merupakan informasi mengenai peristiwa terkait yang didapatkan bukan dari sumber pertama. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal dari beberapa buku dan artikel jurnal. Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang telah peneliti baca yakni *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri* karya Afthonul Afif, *Sukarno, Tionghoa & Indonesia* karya Ardi, Rodolfo D., *Pengantar Ilmu Sejarah* karya Kuntowijoyo, *Pribumi, Minoritas Tionghoa, dan China* karya Leo Suryadinata dan lain sebagainya. Selain buku dan artikel jurnal, peneliti juga memperoleh sumber sekunder dari sumber lisan. Sumber lisan (*oral history*) yakni ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang di wawancara sejarawan (Sjamsuddin, 2012).

Sumber lisan ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama keturunan langsung dari Haji Abdul Karim Oei yang juga merupakan pengurus dari Yayasan Haji Karim Oei yakni HM. Ali

Karim atau Ali Karim Oei untuk mendapatkan informasi secara langsung bagaimana proses berdiri dan berkembangnya dari Yayasan Haji Karim Oei sebagai yayasan keagamaan di Jakarta yang masih berkembang saat ini. Alasan mengapa peneliti melakukan wawancara tersebut dikarenakan Haji Ali Karim Oei merupakan anak pertama dari Haji Abdul Karim Oei sehingga lebih merasakan bagaimana perjuangan Ayahanda-nya karena beliau hidup di tahun yang diteliti oleh peneliti.

3) Verifikasi atau Kritik Sumber

Selepas mendapatkan sumber-sumber penelitian baik primer maupun sekunder, langkah berikutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber ialah melakukan verifikasi atau pemilahan dengan menguji kebenaran dari sumber-sumber terkait. Pengujian ini bertujuan guna data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kritik sumber ini dilakukan menjadi dua tahap, yaitu kritik ekstern untuk menguji keaslian sumber sedangkan kritik intern untuk menguji kredibilitas atau kebenaran dari isi sumber. Baik kritik intern dan ekstern dilakukan dengan memilah sumber berita, buku, artikel, dan wawancara yang telah dikumpulkan. Kritik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dari penulis berita, buku, artikel, dan narasumber untuk melihat sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam kepenulisan sehingga dapat melihat bagaimana

orientasi dan sudut pandang dari penulis terhadap keberlangsungan peristiwa tersebut.

4) Interpretasi

Tahapan berikutnya adalah tahapan interpretasi. Interpretasi ialah kegiatan pemaknaan atas berbagai informasi yang telah didapatkan dari tahapan kritik sumber. Pada tahap ini, interpretasi dilakukan melalui analisis dengan menguraikan berbagai informasi agar menjadi suatu uraian yang sistematis. Uraian yang sistematis tersebut nantinya disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif.

5) Penulisan Sejarah

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, baik memilih topik, mengumpulkan sumber, menguji keaslian dan kebenaran sumber, serta melakukan interpretasi, langkah selanjutnya menjadi langkah terakhir dalam penelitian yakni dengan melakukan Penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi merupakan tahapan penulisan sejarah secara terstruktur dan sistematis sehingga mudah dipahami karena memerhatikan aspek kronologis.

Intelligentia - Dignitas